



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama  
Ekonomi dan Investasi



Airlangga Hartarto



Edi Prio Pambudi

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	1.1	Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD	37,5%
2.	Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	2.1	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp2.175,26 Triliun
		2.2	Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	100%
3.	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	3.1	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	85%
		3.2	Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)	100%
		3.3	Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	100%
4.	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	92%

**Kegiatan**

1. Layanan Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
2. Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral
3. Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Regional
4. Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Multilateral
5. Koordinasi Investasi dan Hilirisasi
6. Koordinasi Ekonomi Makro Fiskal

**Anggaran**

- Rp. 2.799.184.000,-  
Rp. 2.335.907.000,-  
Rp. 4.333.496.000,-  
Rp. 4.236.257.000,-  
Rp. 1.728.028.000,-  
Rp. 1.234.792.000,-

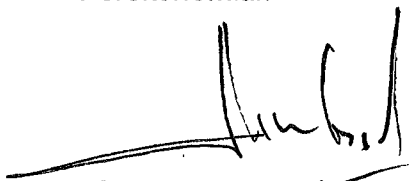
**Total**

(Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

**Rp. 16.757.662.000,-**

Pihak kedua,  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama  
Ekonomi dan Investasi



**Airlangga Hartarto**



**Edi Prio Pambudi**

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 1.1

**Sasaran Program** : SS.1 Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

**Deskripsi Sasaran Program**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD

**Deskripsi IKU** :

**Definisi**

Untuk melaksanakan proses akses OECD tersebut, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, dimana keanggotaan Tim Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional OECD yang terbagi menjadi 26 Bidang sesuai dengan Peta Jalan Akses Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi bertugas mengawal dan mengkoordinasikan Penyelesaian Akses Indonesia ke OECD.

Berdasarkan Peta Jalan Akses OECD Indonesia dan daftar instrumen hukum OECD yang disampaikan Sekretariat OECD, saat ini terdapat 244 instrumen hukum OECD yang menjadi ruang lingkup akses OECD Indonesia. Instrumen tersebut perlu dilakukan penilaian mandiri, penuangan hasil penilaian mandiri dalam dokumen Initial Memorandum, hingga penyempurnaan terhadap standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan Indonesia oleh Pemri sebagaimana masukan dari Komite OECD.

**Formula**

Penyelesaian akses Indonesia ke dalam OECD dari tahun 2025 hingga 2029, dibagi menjadi 3 proses tahapan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD. Ditargetkan selesai dalam 1 tahun di tahun 2025. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses akses OECD dengan **bobot 30**.
2. Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD. Ditargetkan selesai dalam 3 tahun dari 2026 hingga 2028. Mencakup 30% dari seluruh tahapan proses penyelesaian akses OECD dengan **bobot 25**.
3. Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD. Ditargetkan selesai dalam 4 tahun dari 2026 hingga 2029. Mencakup 40% dari seluruh tahapan proses penyelesaian akses OECD dengan **bobot 45**.

Pembobotan indikator persentase capaian akses Indonesia ke OECD disusun berdasarkan pendekatan *results-based management*, dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, kendali kebijakan, serta kontribusi masing-masing tahapan terhadap outcome akhir akses OECD.

Tahapan	Bobot (%)	Argumentasi Utama
1. Initial Memorandum	30%	Output krusial, <i>high effort, full controllability</i>
2. Reviu Komite OECD	25%	<i>Gatekeeping stage, high uncertainty, partial control</i>
3. Penyempurnaan Regulasi	45%	Outcome substantif, <i>highest complexity &amp; impact</i>

Adapun target dari masing-masing indikator OECD sebagai berikut:

Tahapan	2025	2026	2027	2028	2029
a. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024–2025)	100%				
b. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2026–2028)	-	30%	60%	100%	
c. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2027–2029)	-	-	50%	75%	100%

Perhitungan Target per Tahun sejak 2025 menjadi:

1. Tahun 2025 sebesar 30% – (100x30%)
2. Tahun 2026 sebesar 37,5% -- (100x30%) + (30x25%) ;
3. Tahun 2027 sebesar 67,5% -- (100x30%) + (60x25%) + (50X45%);
4. Tahun 2028 sebesar 88,75% -- (100x30%) + (100x25%) + (75X45%); dan
5. Tahun 2029 sebesar 100% -- (100x30%) + (100x25%) + (100X45%).

Adapun perhitungan target dilakukan menggunakan formula berikut:

$$\text{Target Tahun berjalan} = (\Sigma(\text{bobot} \times \text{target indikator OECD di tahun berjalan}) / 100) \times 100\%$$

$$\text{Capaian tiap tahapan} = (\text{Realisasi tahapan pada tahun berjalan} / \text{Target tahun berjalan}) \times 100\%$$

**Capaian Kumulatif (yang dituliskan sebagai Capaian atas IKU) =**

$$\text{Akumulasi realisasi tahun sebelumnya} + \Sigma ((\text{Capaian tiap tahapan} \times \text{Target tahun berjalan}) / 100)$$

#### Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan tahapan proses aksesi Indonesia ke OECD pada tahun berjalan.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sumber Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Tingkat Kendali IKU

(X) High                      (...) Moderate                      (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact                      (...) Proxy                      (...) Activity

<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(.) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non Peta	(...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct	(X) Indirect	
<b>Polarisasi IKU</b>	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	(...) Bulanan	(...) Triwulanan	(...) Semesteran (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>37,5%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>30,75%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>32,5%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>35%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>37,5%</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.1

## Sasaran Program

SS.2 Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi

## Deskripsi Sasaran Program

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar **2.175,26 Triliun Rupiah pada tahun 2026**, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.1. Nilai Realisasi PMA dan PMDN

## Deskripsi IKU

### Definisi

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

### Formula

Formula perhitungan Nilai PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

#### Nilai PMA =

Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

#### Nilai PMDN =

Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

### Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa besaran nilai investasi. Nilai investasi ini akan menjadi salah satu kontributor dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang kontribusinya menjadi nilai kinerja pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan stabil.

## Satuan Pengukuran

Triliun Rupiah

**Unit/Pihak Penyedia Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Sumber Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High                      (...) Moderate                      (X) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact                      (...) Proxy                      (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(.) Sum                      (...) Average                      (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta                      (...) Cascading Non Peta                      (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct                      (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize                      (...) Minimize                      (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(...) Bulanan                      (...) Triwulanan                      (...) Semesteran                      (X) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>Rp 1.905,6 Triliun Rupiah</b>	<b>1.931 Triliun Rupiah</b>	<b>2.175,26 Triliun Rupiah</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	-
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	<b>Rp 1.905,6 Triliun Rupiah</b>	<b>1.931 Triliun Rupiah</b>	<b>2.175,26 Triliun Rupiah</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 2.2

## Sasaran Program

SS.2 Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi

## Deskripsi Sasaran Program

Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar **2.175,26 Triliun Rupiah pada tahun 2026**, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 2.2. Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025

## Deskripsi IKU

### Definisi

Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 merujuk terhadap penyelesaian sejumlah regulasi turunan sebagai salah satu bentuk nyata dukungan implementasi PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang berhasil diundangkan dan/atau terselesaikan. Regulasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa yang terkait dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dalam menjalankan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk mencapai target ini adalah dengan melakukan koordinasi antar sektor untuk mensinkronkan persyaratan, kewajiban, dan tata cara perizinan yang hasil akhirnya adalah regulasi turunan yang akan menunjang implementasi PP 28 Tahun 2025. Penyelesaian regulasi-regulasi turunan ini akan menjadi panduan detail bagi pelaku usaha dan pemroses perizinan di Pusat dan Daerah dalam menjalankan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

### Formula

Formula perhitungan adalah sebagai berikut:

**Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan PP 28 Tahun 2025 =**

$$\frac{\text{Jumlah regulasi Turunan PP 28/2025 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah regulasi turunan PP 28/2025 yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Jumlah regulasi turunan yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 4 sektor regulasi terkait dukungan implementasi PP 28 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Sektor Perhubungan;
2. Sektor Kebudayaan;
3. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

4. Sektor Kelautan dan Perikanan.

**Tujuan**

Memberikan Kepastian Hukum dan Panduan Teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha.

**Satuan Pengukuran**

Persentase

**Unit/Pihak Penyedia Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Sumber Data**

- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High                      (...) Moderate                      (X) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact                      (...) Proxy                      (...) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(...) Sum                      (...) Average                      (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

(X) Cascading Peta                      (...) Cascading Non Peta                      (...) Non-Cascading

**Metode Cascading**

(...) Direct                      (X) Indirect

**Polarisasi IKU**

(X) Maximize                      (...) Minimize                      (...) Stabilize

**Periode Pelaporan**

(...) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (...) Semesteran                      (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>50%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>75%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>75%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.1

**Sasaran Program** : SS.3 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

**Deskripsi Sasaran Program**

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU 3.1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi

**Deskripsi IKU** :

**Definisi**

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

**Formula**

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

**1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)**

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini di bobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 sebesar 30 Komitmen. Berikut daftar komitmen tersebut:

- 1) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Inggris;
- 2) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Korea Selatan;
- 3) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-RRT;
- 4) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Australia;

- 5) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Amerika Serikat;
- 6) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-EAEU;
- 7) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Kanada;
- 8) Komitmen kerja sama ekonomi bilateral RI-Jepang;
- 9) Komitmen pada forum WGTII RI-Rusia;
- 10) Komitmen pada forum SKB RI-Rusia;
- 11) Komitmen pada forum Board Meeting Prospera Phase II;
- 12) Komitmen pada forum the 13th SOM 6 WG RI-Singapura;
- 13) Komitmen pada forum the 16th MM 6 WG RI-Singapura;
- 14) Komitmen pada forum SKB RI-Belarus;
- 15) Komitmen pada forum the 4th PPDT 1.5 RI-Jepang;
- 16) Komitmen pada forum the 4th SOM JCEC RI-Korea Selatan;
- 17) Komitmen pada forum the 3rd MM JCEC RI-Korea Selatan;
- 18) Komitmen pada forum SEOM RI-Australia;
- 19) Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-IPEF;
- 20) Komitmen implementasi dari kesepakatan RI-Korea (IKCEPA);
- 21) Komitmen Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-49 dan ke-50;
- 22) Komitmen Hasil Pertemuan AEC Council ke-27 dan ke-28;
- 23) Komitmen Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-29;
- 24) Komitmen Hasil BIMP-EAGA Summit ke-17;
- 25) Komitmen Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2026.
- 26) Leaders' Declaration;
- 27) Energy Abundance Working Group's Outcomes;
- 28) Innovation Working Group's Outcomes;
- 29) Trade Working Group's Outcomes; dan
- 30) Business 20 Communique.

## 2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Prancis, Rusia, Belarus.

Realisasi dari nilai perdagangan bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi sub komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian sebesar **USD 161 Miliar**. Perhitungan target berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekspor di tahun 2026 dari nilai rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir (2021-2025). Data diolah bersumber dari Kementerian Perdagangan.

## 3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Negara Mitra Indonesia yang dimaksud antara lain Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, RRT, Kanada, Jepang, Australia, Inggris, Uni Eropa, Uni Ekonomi Eurasia, Prancis, Rusia, Belarus.

Realisasi nilai investasi bersifat tahunan. Nilai yang diperoleh di suatu tahun dapat terealisasi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan.

Komponen ini di bobotkan sebesar 10% karena subkomponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia tahun 2026 yang memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan Kemenko Perekonomian sebesar **USD 35 Milyar**. Perhitungan target berdasarkan total nilai rata-rata investasi dengan

negara mitra utama Indonesia 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website BKPM/Kementerian Investasi  
Sehingga realisasi IKU Efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas

*Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional =*

$$80\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}$$

### Tujuan

IKU ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam mendorong hasil nyata berupa peningkatan jumlah komitmen kerja sama, nilai perdagangan, dan nilai investasi dengan negara mitra utama Indonesia.

Satuan Pengukuran

Persentase

Unit/Pihak Penyedia Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Pejabat Penanggung Jawab Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Sumber Data

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Tingkat Kendali IKU

(...) High (X) Moderate (...) Low

Tingkat Validitas IKU

(X) Exact (...) Proxy (...) Activity

Jenis Konsolidasi Periode

(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU

(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading

Metode Cascading

(...) Direct (X) Indirect

Polarisasi IKU

(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize

Periode Pelaporan

(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	82%	N/A	85%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	N/A	12,5%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	-	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	N/A	70%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	82%	N/A	85%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

## Sasaran Program

SS.3 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

## Deskripsi Sasaran Program

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.2. Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (EU-CEPA)

## Deskripsi IKU

### Definisi

IKU ini mengukur proses dan upaya penyelesaian kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (EU-CEPA), dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam menyelesaikan hasil perundingan, menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan didorong dari pemanfaatan kesepakatan ini dalam masa mendatang. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan unit dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan European Union (EU) sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi dalam tiap tahapan.

### Formula

#### Persentase Penyelesaian Indonesia-EU CEPA:

$$\frac{\text{Jumlah tahapan penyelesaian kesepakatan yang selesai}}{\text{Jumlah tahapan penyelesaian kesepakatan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2026 ada 4 tahapan yang akan ditargetkan:

1. Rakor antar Kementerian Lembaga membahas hasil Legal Scrubbing IEU-CEPA
2. Pertemuan Bilateral dengan Uni Eropa
3. Rakortas Persiapan Penandatanganan Perjanjian IEU-CEPA
4. Penandatanganan Perjanjian IEU-CEPA

	<b>Tujuan</b>
	IKU ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian proses dan upaya penyelesaian kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (EU-CEPA), dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam menyelesaikan hasil perundingan, menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan didorong dari pemanfaatan kesepakatan ini dalam masa mendatang.
<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Sumber Data</b> :	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High (X) Moderate (...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(..) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b> :	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b> :	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>10%</b>
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>50%</b>
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>75%</b>
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 3.2

## Sasaran Program

SS.3 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

## Deskripsi Sasaran Program

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 3.3. Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

## Deskripsi IKU

### Definisi

IKU ini mengukur proses dan upaya penyelesaian kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat, dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam menyelesaikan hasil perundingan, menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan didorong dari pemanfaatan kesepakatan ini dalam masa mendatang. Perjanjian ini ditangani oleh beberapa Kementerian dengan koordinasi utamanya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perjanjian ini penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Indikator ini mencerminkan keberhasilan atas unit dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat sebagai mitra utama Indonesia yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi dalam tiap substansi kesepakatan.

### Formula

$$\frac{\text{Perundingan Kedua Perdagangan Resiprokal RI-AS:}}{\text{Jumlah substansi kesepakatan yang selesai}} \times 100\% \\ \text{Jumlah substansi kesepakatan yang ditargetkan}$$

Adapun target substansi kesepakatan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Substansi Kesepakatan ART (*Agreement Reciprocal Trade*)
2. Penyelesaian Substansi Kesepakatan CSC (*Country Specific Commitment*)

3. Penyelesaian Substansi Kesepakatan *Joint Statement* Penandatanganan dokumen kerja sama B2B pada Indonesia-US *Business Summit*
4. Penyelesaian Substansi Kesepakatan terkait *Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974*
5. Penyelesaian Substansi kesepakatan pada amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS, yang terbagi ke dua proses
  - a. Penyusunan amandemen
  - b. Tindak lanjut amandemen

**Tujuan**

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendorong penyelesaian isu strategis pada kesepakatan pada perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Sumber Data</b>	: Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sam Ekonomi dan Investasi
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(...) High (X) Moderate (...) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (...) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	: (X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	: (...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	75%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	87,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 4.1

**Sasaran Program** : SS 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas

**Deskripsi Sasaran Program** Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang menjalankan fungsinya sebagai:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
5. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : IKU.4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Deskripsi IKU** : **Definisi**  
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)**. Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

- (1) Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
  - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
  - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
  - Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
- (2) Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
  - Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
  - Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

- Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
- (3) Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
- Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
  - Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
- (4) Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
- (5) Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
- Pelaporan secara berkala terkait *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED)
  - Perkembangan ekonomi global dan domestik
  - Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal bussiness* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi).

**Formula**

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

**Tujuan**

Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan serta memberikan gambaran sektor yang harus dijadikan fokus guna pencapaian target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

**Satuan Pengukuran**

Indeks

**Unit/Pihak Penyedia Data**

Seluruh Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Pejabat Penanggung Jawab Data**

Seluruh Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Sumber Data**

Seluruh Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Tingkat Kendali IKU**

(...) High (X) Moderate (....) Low

**Tingkat Validitas IKU**

(X) Exact (...) Proxy (....) Activity

**Jenis Konsolidasi Periode**

(...) Sum (....) Average (X) Take Last Known Value

**Jenis Cascading IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Cascading Peta	<input type="checkbox"/> Cascading Non Peta	<input type="checkbox"/> Non-Cascading
--	---	--

**Metode Cascading**

<input type="checkbox"/> Direct	<input checked="" type="checkbox"/> Indirect
---------------------------------	--

**Polarisasi IKU**

<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
--	-----------------------------------	------------------------------------

**Periode Pelaporan**

: 

<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>
s.d. Triwulan I	1 dari 4	N/A	1 dari 4
s.d. Triwulan II	1 dari 4	N/A	1 dari 4
s.d. Triwulan III	2 dari 4	N/A	2 dari 4
s.d. Triwulan IV	3 dari 4	N/A	3 dari 4

# MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 5.1

## Sasaran Program

SS.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

## Deskripsi Sasaran Program

Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, dengan orientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan pengguna secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam memberikan fasilitas dan sarana pelayanan yang mencakup:

- Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

## Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU 5.1. Indeks Kepuasan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

## Deskripsi IKU

### Definisi

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

### Formula

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Kepuasan} \\ & \text{Layanan Sinkronisasi,} \\ & \text{Koordinasi, dan} \\ & \text{Pengendalian} \\ & = (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ & \text{1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ & \text{2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ & \text{3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep} \\ & \text{4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\ & \text{5}) / 5 \end{aligned}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

	<b>Tujuan</b>
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas
<b>Satuan Pengukuran</b>	Indeks
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Kedeputan Bidang Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Sumber Data</b>	: Hasil Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(..) High (X) Moderate (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(X) Exact (.....) Proxy (...) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non Peta (..) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(...) Direct (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b>	: (X) Maximize (.....) Minimize (...) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b>	: (....) Bulanan (X) Triwulanan (....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	<b>3 dari 4</b>	<b>N/A</b>	<b>3 dari 4</b>
s.d. Triwulan I	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan III	3 dari 4	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	3 dari 4	N/A	3 dari 4

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE IKU: 6.1

**Sasaran Program** : SS.6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional

**Deskripsi Sasaran Program** : Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputian. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** : 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

**Deskripsi IKU** :

<b>Definisi</b>
Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah SAKIP, Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, dan Tingkat Implementasi Sistem Kerja.
<b>Formula</b>
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi: $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$ Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi capaian kinerja yang tercermin dalam nilai SAKIP;</li> <li>2. Digitalisasi Arsip melalui Srikandi;</li> <li>3. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;</li> <li>4. Pelaksanaan Dialog Kinerja;</li> <li>5. Pemetaan Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 2026;</li> </ol>
<b>Tujuan</b>
Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon I.

<b>Satuan Pengukuran</b>	Persentase
<b>Unit/Pihak Penyedia Data</b>	Biro Hukum dan Organisasi
<b>Pejabat Penanggung Jawab Data</b>	Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
<b>Sumber Data</b> :	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian
<b>Tingkat Kendali IKU</b>	(....) High                      (X) Moderate                      (.....) Low
<b>Tingkat Validitas IKU</b>	(....) Exact                      (X) Proxy                      (.....) Activity
<b>Jenis Konsolidasi Periode</b>	(....) Sum                      (.....) Average                      (X) Take Last Known Value
<b>Jenis Cascading IKU</b>	(X) Cascading Peta                      (.....) Cascading Non Peta                      (....) Non-Cascading
<b>Metode Cascading</b>	(..) Direct                      (X) Indirect
<b>Polarisasi IKU</b> :	(X) Maximize                      (.....) Minimize                      (.....) Stabilize
<b>Periode Pelaporan</b> :	(....) Bulanan                      (X) Triwulanan                      (....) Semesteran                      (....) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
<b>TAHUNAN</b>	N/A	N/A	85%	N/A	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	N/A	65%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	N/A	92%

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	Persentase Penyelesaian Tahapan Akses Indonesia ke OECD	37,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan penyelesaian proses reuiu atas dokumen IM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyusunan <i>national action plan</i> bidang Lingkungan Hidup</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Kimiawi dan Bioteknologi</li> <li>Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Kebijakan Ekonomi Digital</li> <li>Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Kebijakan Fiskal</li> <li>Koordinasi penyiapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri OECD</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Ekonomi Digital</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Persaingan Usaha</li> <li>Koordinasi finalisasi jawaban kuesioner bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor</li> <li>Koordinasi finalisasi jawaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Kebijakan Fiskal</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Kebijakan Statistik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi persiapan kunjungan tim OECD</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Asuransi dan Dana Pensiun</li> <li>Koordinasi pelaksanaan <i>accession mission</i> dan penyusunan <i>national action plan</i> bidang Pertanian</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					jawaban kuesioner bidang Perdagangan dan Kredit Ekspor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Persaingan Usaha</li> <li>• Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Kebijakan Statistik</li> </ul>	kuesioner bidang Kebijakan Fiskal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi finalisasi jawaban kuesioner bidang Kebijakan Statistik</li> <li>• Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Asuransi dan Dana Pensiun</li> <li>• Koordinasi penyiapan jawaban kuesioner bidang Pertanian</li> </ul>		
2	Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	2.175,26 Triliun Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi melalui pengawalan pengembangan hilirisasi komoditas strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2025</li> <li>• Rapat Koordinasi Penyelesaian Hambatan Investasi di Bidang Hilirisasi: Keberlanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Tahun 2025 dan Triwulan I 2026.</li> <li>• Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Triwulan II 2026</li> <li>• Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Road Map Hilirisasi Rumput Laut Triwulan III 2026</li> <li>• Rapat Koordinasi Capaian Pembiayaan Pengembangan Komoditas Rumput Laut</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Investasi Komoditas Perikanan di Danau Toba	Rumput Laut (KUR, BLU dan LPDB) triwulan I tahun 2026: Masalah dan Hambatan selama Januari-Maret 2026	(KUR, BLU dan LPDB) triwulan II tahun 2026: Masalah dan Hambatan selama April-Juni 2026	(KUR, BLU dan LPDB) triwulan III tahun 2026: Masalah dan hambatan selama Juli-Sept 2026\ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Nilai Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2026: Pra Pelaporan Tahun 2026</li> </ul>
		Persentase Penyelesaian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Penyelesaian Regulasi Turunan dan Instrumen Pelaksanaan PP 28 Tahun 2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghimpunan Usulan Perubahan Bidang Usaha pada Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pada sektor kelautan dan perikanan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah</li> <li>• Koordinasi Penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Penyelesaian Substansi Penyempurnaan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha (Penanaman PP 28/2025, Permen/Perka pasa Sistem OSS)</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				<p>dari Kementerian/Lembaga dan pelaku usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Penyelesaian Permen dan Perka pelaksana PP No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko untuk sektor kelautan dan perikanan; sektor energi dan sumber daya mineral; sektor keagamaan; sektor lingkungan hidup, dan subsektor keamanan.</li> <li>• Koordinasi penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor</li> </ul>	<p>pelaksanaan regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Draft Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) dari Kementerian/Lembaga dan Pelaku Usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelesaian regulasi turunan PP 28/2025 pada sektor kelautan dan perikanan serta energi dan sumber daya mineral</li> <li>• Finalisasi Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)</li> </ul>	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					perhubungan dan sektor kebudayaan.			
3	Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Koordinasi dan akselerasi pencapaian komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ RI-Inggris Economic Growth Partnership Agreement</li> <li>○ Forum WGTII RI – Rusia (Protocol WGTII RI-Rusia)</li> <li>○ Implementasi Ke sepakatan RI-IPEF (Agreed Minutes Supply Chain LRAB Meeting)</li> <li>○ HLTF-EI ke-49</li> <li>○ Pertemuan APEC Economic Committee ke-1</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea (Penandatanganan MOU on Economic Cooperation 2.0)</li> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok (Joint Press Release pada International Seminar on Upskilling Negotiation for Government Officials of Indonesia)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia-Amerika Serikat (Joint Statement pada KTT STM (Industry outreach, bilateral meeting, dan SEAFEC))</li> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia – EAEU (Ratifikasi Indonesia - EAEU FTA)</li> <li>○ Forum the 4th PPDT 1.5 Indonesia-Jepang (Joint</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral periode Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia-Kanada (Ratifikasi I-CA CEPA)</li> <li>○ Forum SEOM RI - Australia (Agreed Minutes of Indonesia - Australia SEOM)</li> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang (Ratifikasi Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership</li> </ul> </li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan I</li> <li>● Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerja Sama Bilateral Indonesia – Australia (Penandatanganan High Level Action Plan Prospera Phase II)</li> <li>○ Forum SKB RI – Rusia (Agreed Minutes of JCM RI – Russia)</li> <li>○ Forum Board Meeting Prospera Phase II (Agreed Minutes of Prospera Board Meeting)</li> <li>○ Forum the 13th Senior Official Meeting 6 WG Indonesia – Singapura (Agreed Minutes of the 13th Senior Official Meeting 6 WG Indonesia – Singapura)</li> <li>○ Forum The 16th Ministerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Statement Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-4 Indonesia-Jepang</li> <li>○ Forum the 4th Senior Official Meeting Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) RI – Korea (Agreed Minutes of the 4th Senior Official Meeting JCEC RI – Korea)</li> <li>○ Forum the 3rd Ministerial Meeting Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) RI-Korea (Agreed Minutes of the 3rd Ministerial Meeting JCEC RI-Korea)</li> <li>○ Implementasi Ke sepakatan RI-IPEF (Agreed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agreement (IJEPA))</li> <li>○ Forum SEOM RI - Australia (Agreed Minutes of Indonesia - Australia SEOM)</li> <li>○ Pertemuan AEC Council ke-28</li> <li>○ KTT ASEAN ke-49</li> <li>○ BIMP-EAGA ke-29</li> <li>○ Leaders' Declaration G20 Presidensi Amerika Serikat</li> <li>○ Komitmen pada <i>Leaders' Declaration G20 Presidensi Amerika Serikat</i></li> <li>○ Komitmen negara anggota dari <i>Outcomes Energy Abundance Working Group, Trade Working Group, Innovation</i></li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						<p>Meeting 6 WG Indonesia-Singapura (Joint Report to Leaders pada the 16th Ministerial Meeting 6 WG Indonesia-Singapura)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forum SKB RI – Belarus (Agreed Minutes of JCM RI – Belarus)</li> <li>○ Implementasi dari Kesepakatan RI Korea CEPA (Summary of Discussion of the 4th Committee on Economic Cooperation Meeting Indonesia-Korea)</li> <li>○ AEC Council ke-27</li> <li>○ KTT ASEAN ke-48</li> <li>○ BIMP-EAGA Summit ke-17</li> <li>○ Pertemuan Sherpa ke-2 G20</li> </ul>	<p>Minutes Supply Chain Council)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HLTF-EI ke-50</li> <li>○ APEC Economic Committee ke-2</li> <li>○ APEC Economic Committee ke-2</li> <li>○ Pertemuan Sherpa ke-3 G20 Presidensi Amerika Serikat</li> <li>● Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan III</li> <li>● Menganalisa potensi investasi</li> </ul>	<p><i>Working Group, dan B20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pertemuan Sherpa ke-1 Presidensi G20 Inggris</li> <li>● Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan IV</li> <li>● Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Presidensi Amerika Serikat • Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan II • Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan II	dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan III	hasil komitmen kerja sama dengan negara mitra pada triwulan IV

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan Percepatan Koordinasi dalam tahapan penyelesaian kesepakatan pada Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan dan Perencanaan Timeline Penyelesaian IEU-CEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rakor antar Kementerian Lembaga membahas hasil Legal Scrubbing IEU-CEPA</li> <li>Pertemuan Bilateral dengan Uni Eropa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rakortas Persiapan Penandatanganan Perjanjian IEU-CEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penandatanganan Perjanjian IEU-CEPA</li> </ul>
		Persentase Penyelesaian Kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi proses penyelesaian substansi kesepakatan pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Substansi Kesepakatan ART (<i>Agreement Reciprocal Trade</i>)</li> <li>Penyelesaian Substansi Kesepakatan CSC (<i>Country Specific Comitment</i>)</li> <li>Penyelesaian Substansi Kesepakatan <i>Joint Statement</i></li> </ul>	Penyelesaian Substansi Kesepakatan terkait <i>Consultation of Section 301 Investigation of the Trade Act of 1974</i>	Penyelesaian Substansi kesepakatan pada amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS: Penyusunan Amandemen	8. Penyelesaian Substansi kesepakatan pada amandemen perjanjian perdagangan resiprokal (ART) Indonesia-AS: Tindak Lanjut Amandemen

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Penandatanganan dokumen kerja sama B2B pada Indonesia-US <i>Business Summit</i>			
4	Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kualitas Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan terkait penguatan dan/atau kerja sama ekonomi dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi kendala dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi untuk penyamaan persepsi dalam penetapan fokus dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian komitmen kerja sama ekonomi internasional</li> <li>Melakukan koordinasi untuk penyelesaian kendala dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ekonomi dan investasi</li> </ul>
5	Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Layanan melalui Evaluasi Pengukuran Survei Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Triwulan I</li> <li>Pelaksanaan Dialog Kinerja dalam rangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Triwulan II</li> <li>Penguatan Layanan di Bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Triwulan III</li> <li>Penguatan Layanan di Bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran Hasil Survei Kepuasan Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian selama tahun 2026</li> <li>Evaluasi menyeluruh</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Ekonomi dan Investasi yang berkualitas			Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas	Evaluasi Total Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	Ketangapan dan Keandalan dalam Pelayanan	Kepastian dalam Pelayanan	terkait Layanan Dukungan Deputy tahun 2026
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi	92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Manajemen Kinerja Individu dan Unit</li> <li>• Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian, Rencana Aksi dan Manual IKU Tahun 2026</li> <li>• Penyusunan Renja 2027</li> <li>• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I</li> <li>• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev Realisasi Anggaran Triwulan I</li> <li>• Penyusunan RPD Triwulan I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II</li> <li>• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev Realisasi Anggaran Triwulan II</li> <li>• Penyusunan RPD Triwulan II</li> <li>• Penyusunan Hasil Tindaklanjut Laporan Hasil Pemantauan SP4N-LAPOR!</li> <li>• Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan</li> <li>• Pemenuhan Dokumen Pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP</li> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III</li> <li>• Fasilitasi Evaluasi AKIP Eselon I</li> <li>• Penyusunan Revisi Renja 2026</li> <li>• Penyusunan TOR dan RAB Tahun 2027</li> <li>• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev Realisasi Anggaran Triwulan III</li> <li>• Penyusunan RPD Triwulan III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV</li> <li>• Penyusunan Laporan Kompilasi Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV</li> <li>• Fasilitasi Evaluasi AKIP Eselon I</li> <li>• Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027</li> <li>• Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI</li> <li>• Monev Realisasi Anggaran Triwulan IV</li> <li>• Implementasi LLAT</li> </ul>

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan Rencana Pengadaan pada SIRUP</li> <li>• Monev Pemanfaatan Aplikasi e-kinerja BKN Triwulan I</li> <li>• Pemetaan Rencana Aksi RB Tematik 2026</li> <li>• Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan</li> <li>• Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan Keuangan BPK</li> <li>• Koordinasi Hasil Rekomendasi BPK</li> <li>• Penyampaian Usulan Data Responden Internal dan Eskternal Survei Penilaian Integritas</li> <li>• Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan</li> <li>• Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RPD Triwulan IV</li> <li>• Penyusunan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemantauan SP4N-LAPOR!</li> <li>• Monev Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan</li> <li>• Sosialisasi pengisian SPI</li> <li>• Dukungan Publikasi Konten dan Penggunaan Logo BerAKHLAK</li> </ul>

Jakarta, 31 Januari 2026

Deputi Bidang Koordinasi Kerja  
Sama Ekonomi dan Investasi,



Edi Prio Pambudi